



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IV DPR RI
DENGAN
KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : II
Rapat Ke- : 4
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 8 November 2023
Waktu : Pukul 16.25 s.d. 17.27 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
- Ketua Rapat : Anggia Erma Rini, M.K.M. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)
- Acara : 1. Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023;
2. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024; dan
3. Isu-isu aktual lainnya.
- Sekretaris Rapat : Ulfa Nurfajar, S.E., M.A.B., (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
- Hadir : **A. Anggota DPR RI:**
31 dari 52 orang Anggota dengan rincian:
1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
7 dari 11 orang Anggota
 1. Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI
 2. Dr. Riezky Aprilia, S.H., M.H.
 3. Ono Surono, S.T.
 4. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.
 5. Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si.
 6. Vita Ervina, S.E. M.B.A.
 7. M.R. Ihsan Yunus, BA., B.Comm., ME.Con.
 2. Fraksi Partai Golongan Karya
4 dari 8 orang Anggota
 1. Ir. Budhy Setiawan, M.Si/Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.
 2. Ir. H. Hanan A. Rozak, M.S.

3. Teti Rohatiningsih, S.Sos
4. Ravindra Airlangga, M.S.

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
3 dari 7 orang Anggota
 1. Ir. KRT.H. Darori Wonodipuro, M.M.
 2. Ir. Endro Hermono, M.B.A.
 3. Dr. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.Sc.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat
2 dari 6 orang Anggota
 1. Ir. Abdullah Tuasikal
 2. Julie Sutrisno

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
4 dari 5 orang Anggota
 1. Anggia Erma Rini, M.K.M./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.
 2. H. Muhtarom, S.Sos.
 3. Drs. H. Ibnu Multazam
 4. Edward Tannur, S.H.

6. Fraksi Partai Demokrat
2 dari 5 orang Anggota
 1. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
 2. Hj. Nur'aeni, S.Sos., M.Si

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
4 dari 5 orang Anggota
 1. Drh. H. Slamet
 2. Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., M.M.
 3. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
 4. H. Johan Rosihan, S.T.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional
4 dari 4 orang Anggota
 1. Dr, H. Muhammad Syafrudin, S.T., M.M.
 2. Haerudin, S.Ag., M.H.
 3. Ir. Alimin Abdullah
 4. Daeng Muhammad, S.E., M.Si.

10. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
1 hadir dari 2 orang Anggota
 1. Ema Umiyyatul Chusnah

C. Pimpinan/Anggota Izin

Fraksi Partai Gerindra

1. Ir. Dwita Ria Gunadi
2. Dr. Azikin Solthan, M.Si.

C. Pemerintah

1. H. Arief Prasetyo Adi, S.T., M.T. (Kepala Badan Pangan Nasional);
2. Dr. Sarwo Edhy, S.P., M.M. (Plt. Sekretaris Utama);
3. Dr. I Gusti Ketut Ketut Astawa, S.Sos., M.M. (Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan);
4. Dr. Nyoto Suwignyo, M.M. (Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi);
5. Dr. Andriko Noto Susanto, S.P., M.P. (Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan);
6. Budi Waseso (Direktur Utama Perum BULOG) beserta jajaran; dan
7. Nina Sulistyowati (Kuasa Direktur Utama/ Direktur Komersial PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID FOOD) beserta anak perusahaan.

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Yang terhormat Kepala Badan Pangan Nasional beserta semua jajarannya,
Yang terhormat Direktur Utama Perum Bulog beserta semua jajarannya.**

Terima kasih kopinya sudah di *remove*.

**Yang terhormat Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food beserta anak perusahaan, dan
Hadirin yang saya hormati,**

Mengawali rapat hari ini mari kita panjatkan puji syukur tentunya karena hari ini setelah tadi pagi kita rapat dan langsung kita adakan RDP lagi dengan Bapanas, kita masih sehat dan bugar.

Sesuai Jadwal Rapat Acara Rapat-rapat DPR RI Masa Sidang II Tahun Sidang 2023-2024 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 27 September 2023 dan keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 2 November 2023, pada hari ini Rabu, 8 November 2023, Komisi IV DPR RI menyelenggarakan RDP dengan Kepala Badan Pangan Nasional menghadirkan Dirut Utama Perum Bulog dan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food dalam rangka membahas evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran

tahun 2023, rencana program dan kegiatan tahun 2024, dan isu-isu aktual lainnya.

Bapak Ibu yang kami hormati,

Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, RDP ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum, setuju?

**(RAPAT DIMULAI PUKUL 16.24 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)**

RDP hari kita mulai pada pukul 16.30 dan akan diakhiri pada pukul 17.30. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib atau atas kesepakatan bersama, dengan susunan acara sebagai berikut.

1. Pengantar ketua rapat;
2. Penjelasan Kepala Badan Pangan Nasional terhadap agenda rapat;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV DPR RI;
4. Jawaban Kepala Badan Pangan Nasional;
5. Kesimpulan;
6. Penutup.

Apakah disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Badan Pangan Nasional berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan pangan, khususnya dalam koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilitas pasokan dan harga pangan. Hal-hal tersebut dielaborasi ke dalam beberapa kegiatan dan program yang juga mendukung upaya mengatasi kerawanan pangan dan menjamin ketersediaan pangan yang beragam, bergizi dan terjangkau. Jadi beragam karena di Indonesia punya banyak sekali ragam pangan yang memang punya nilai gizi tentunya harus bergizi karena negara kita menginginkan juga generasi kita generasi yang unggul dan terjangkau aksesibilitas itu bisa dijangkau oleh dan dirasakan oleh masyarakat.

Sejalan dengan hal itu, Komisi IV DPR RI ingin mendapatkan penjelasan mendetail mengenai pelaksanaan anggaran Badan Pangan Nasional tahun 2023 serta rencana kegiatan 2024 mendatang.

Saudara Kepala Badan Pangan Nasional beserta jajaran,

Kita ketahui pangan menjadi isu klasik yang permasalahannya tidak pernah lepas dari ketersediaan dan harga yang fluktuatif apalagi hari ini, apalagi hari ini krisis pangan yang tidak yang sudah mengancam di secara global dan kita kalau kita ada habis rapat tadi masih banyak masih belum tenang karena masih belum banyak stok yang bisa kita harapkan untuk ketersediaan pangan kita ke depan. Harga juga tinggi sekali. Keterbatasan pasokan dari sumber pangan menjadi alasan yang selalu dikemukakan ketika

ada hambatan atau kendala dalam penyediaan pangan yang dapat diakses dengan harga yang terjangkau.

Seperti tahun-tahun sebelumnya isu mengenai ketersediaan dan gejolak harga pangan selalu menjadi sorotan menjelang hari besar keagamaan nasional dan akhir tahun. Berdasarkan data-data yang terkumpulkan beberapa harga komoditas pangan berada pada posisi stabil tinggi dan mengalami kenaikan. Tetapi apakah hari ini kayaknya paling tinggi ya di dibandingkan tahun-tahun berikutnya?

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (H. ARIEF PRASETYO ADI, S.T., M.T.):

Kalau hari ini beberapa produk iya paling tinggi.

KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Paling tinggi ya.

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (H. ARIEF PRASETYO ADI, S.T., M.T.):

Seperti gula paling tinggi.

KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Kalau beras pernah lebih tinggi?

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (H. ARIEF PRASETYO ADI, S.T., M.T.):

Beras pernah lebih tinggi tapi sekarang sudah lebih datar hari ini.

KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Stabil tapi tinggi.

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (H. ARIEF PRASETYO ADI, S.T., M.T.):

Stabil tapi tinggi karena biaya produksi.

KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Stabil tinggi ya.

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (H. ARIEF PRASETYO ADI, S.T., M.T.):

Stabil tinggi tapi karena biaya produksi meningkat.

KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Baik, terima kasih Pak Arief.

Tidak hanya masalah harga dan ketersediaan di pasar, hal lain yang perlu diperhatikan adalah pasokan bahan pangan dari produsen ke pasar sejauh mana produksi maupun hasil panen bahan pokok yang diperoleh.

Melalui rapat hari ini Komisi IV DPR RI ingin mendapatkan gambaran mengenai potret kondisi pangan pokok di berbagai daerah untuk memetakan daerah produksi dan konsumsi komoditas pangan, daerah yang selalu mengalami defisit ketersediaan bahan pangan tertentu hingga data mengenai daerah-daerah yang sering mengalami kenaikan harga pangan.

Melalui pemerintah melalui Badan Pangan Nasional harus memiliki langkah strategis yang harus diambil dalam rangka mengamankan stok pangan nasional. Komisi IV DPR memandang hal pertama yang harus dimiliki dalam rangka mengamankan stok pangan adalah validitas dan keselarasan data baik data stok pangan hingga data kebutuhan pangan yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Untuk itu Badan Pangan Nasional harus memiliki sistem untuk menghitung dan melihat stok pangan *existing* yang akan menjadi basis data pangan nasional dan acuan dalam merumuskan kebijakan pangan nasional.

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Demikian pengantar yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya silakan Kepala Badan Pangan Nasional untuk menyampaikan penjelasan secara rinci dan terukur terkait hal-hal tersebut di atas. Silakan Pak Arief.

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (H. ARIEF PRASETYO ADI, S.T., M.T.):

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'aikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,*

Yang kami hormati segenap Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, Direktur Utama Perum Bulog beserta jajaran,

**Direktur Utama ID Food atau yang mewakili beserta jajaran,
Bapak-Ibu hadirin sekalian yang berbahagia.**

Terima kasih kami ucapkan kepada Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI atas undangan rapat dengar pendapat sore hari ini. Dalam kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tiga topik sesuai dengan agenda rapat. Yang pertama evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024, dan yang ketiga kondisi aktual pangan nasional.

Sesuai dengan agenda pertama izinkan kami menyampaikan laporan realisasi anggaran Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2023 di mana kami mendapatkan alokasi anggaran sebesar 464,7 miliar. Sampai dengan tanggal 6 November 2023 realisasi anggaran sebesar 303,9 miliar atau sebesar 65,39%, satker pusat 77,9%, satker daerah 37,17% karena ini efektif baru per 1 Agustus 2023. Target kami realisasi sampai dengan akhir tahun 98%. Untuk mencapai target tersebut kami terus memaksimalkan realisasi serapan anggaran di pusat serta mendorong dinas urusan pangan provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia akan mempercepat realisasi serapan anggaran dekonsentrasi.

Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi IV dan hadirin yang berbahagia,

Agenda kedua mengenai Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024. Kami sampaikan bahwa sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kami menuangkan rencana kegiatan Badan Pangan Nasional tahun 2024 ke dalam empat kegiatan pada dua program kerja yakni program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas serta dukungan manajemen dan teknis lainnya dalam program dukungan manajemen.

Selanjutnya sesuai dengan arah APBN tahun anggaran 2024 dan nota keuangannya pada tahun 2024, pagu anggaran Badan Pangan Nasional sebesar 442,6 miliar dan berdasar pagu ini kami telah menyusun rancangan program kegiatan tahun 2024 yang akan dilaksanakan terdiri dari program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas sebesar 327,8 miliar yang terdiri dari kegiatan pemantapan ketersediaan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Ini Deputi I sebesar 139,1 miliar, pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi Deputi II sebesar 86,8 miliar dan pemantapan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan Deputi III sebesar 101,9 miliar. Program dukungan manajemen sekretariat utama sebesar 114,8 miliar yang terdiri gaji dan operasional perkantoran, belanja mengikat sebesar 63,9 miliar, dukungan manajemen teknis lainnya sebesar 51,0 miliar.

Bapak-Ibu Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,

Agenda berikutnya terkait kondisi aktual pangan nasional. Berdasarkan prognosa neraca pangan periode Januari sampai dengan Desember 2023

update per tanggal 20 Oktober 2023 secara umum ketersediaan 12 komoditas pangan strategis kita proyeksikan aman dan cukup memenuhi kebutuhan hingga akhir 2023. BUMN Pangan beserta Badan Pangan Nasional sedang ber*progres* dalam penguatan cadangan pangan pemerintah. Stok level masing-masing komoditas ditargetkan sekitar 5% sampai dengan 10% dari kebutuhan atau *Market Share* nasional untuk dapat mengintervensi pasar. Hampir semua komoditas sudah kami siapkan stoknya, untuk jagung kami terus dorong agar Perum Bulog untuk bisa melakukan penguatan cadangan jagung pemerintah.

Secara umum harga pangan nasional menunjukkan angka yang stabil. Terdapat kenaikan harga pada cabai merah keriting, kemudian jagung, gula konsumsi, sedangkan harga GKP GKG dan beras kenaikan harga sudah melandai. Badan Pangan Nasional mengajak seluruh stakeholders baik pusat maupun daerah untuk mendukung upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan sebagaimana arahan dari teman-teman Komisi IV dan juga Pak Presiden akan terwujudnya harga wajar dari hulu sampai dengan hilir.

Inflasi di Indonesia pada Bulan Oktober tahun 2023 di angka 2,56% *year on year* dan berdasarkan komponennya inflasi bergejolak atau *volatile food* berada di angka 5,54% *year on year*. Beras menjadi salah satu komoditas penyumbang utama andil inflasi sebesar 0,58%. Intervensi pemerintah berupa bantuan pangan beras efektif menahan laju inflasi beras seperti terlihat dalam grafik sebelah kanan untuk periode penyaluran April sampai dengan Juni, kemudian berikutnya ada di Bulan September.

Nilai tukar petani Bulan Oktober tahun 2023 menunjukkan angka 115,78%, NTP tanaman pangan bulan Oktober 2023 sebesar 114,55 atau lebih tinggi 14,08% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sebelumnya pernah mencapai 95,28%. Perum Bulog saat ini memiliki *secure stock* sebanyak 1,39 juta ton dengan realisasi penyaluran beras nasional pada tahun 2023 hingga minggu pertama bulan November 2023 baik yang digunakan untuk bantuan pangan, SPHP dan tanggap darurat sebanyak 2,065 juta ton. Proyeksi stok CBP akhir tahun 2023 sebesar 1,2 juta ton dengan adanya kepastian penyaluran bantuan pangan tahun 2024, alokasi enam bulan estimasi stok akhir tahun 2024 sebesar 1,17 juta ton.

Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, Badan Pangan Nasional telah selesai melakukan penyaluran cadangan pangan pemerintah tahap pertama untuk bantuan pangan beras tahap kedua berikutnya 21,3 juta ini akan menjadi 22 juta. Kemudian ada bantuan daging ayam dan telur ayam kepada 1,4 juta KRS dan penyaluran ini sudah berjalan. Untuk penyaluran bantuan pangan beras tahap 2 sudah mencapai 67,93% dan bantuan pangan daging ayam dan telur telah mencapai 40,87% yang akan diselesaikan pada bulan November 2023.

Ibu Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV,

Kami tentunya mengundang Bapak Ibu pada saat kami melakukan kegiatan pasar murah bantuan pangan agar teman-teman dari Komisi IV bisa hadir dalam bentuk pengawasan kepada program kerja yang dilakukan Badan

Pangan Nasional. Rencana penyaluran bantuan pangan tahun 2024 dilaksanakan melalui dua tahap yakni Januari sampai dengan Maret, kemudian April sampai Juni. Bantuan pangan beras tahun 2024 diusulkan menggunakan data pensasaran, percepatan, penghapusan kemiskinan ekstrem dari Kemenko PMK sebanyak 22 juta KPM. Sedangkan bantuan penanganan *stunting* sebanyak 1,4 juta KRS dari BKKBN.

Badan Pangan Nasional mengantisipasi terus berlanjutnya kenaikan harga beras di tingkat konsumen melalui penderasan distribusi beras SPHP. Realisasi penyaluran beras SPHP sampai dengan 7 November 2023 sebesar 905.000 ton. Penyaluran terbesar di wilayah DKI Jakarta dan Banten, Jawa Timur dan Jawa Barat. Berdasarkan penugasan impor pertama sebesar 250.000 ton Bulog telah berkontrak 171.000 ton dengan estimasi tiba pada tanggal 15 November 2023 di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Badan Pangan Nasional mendorong Perum Bulog untuk segera menyalurkan SPHP jagung kepada peternak mandiri yang listnya dari teman-teman Direktorat Jenderal PKH Kementan.

Dalam rangka menstabilisasi pasokan dan harga pangan daerah, Badan Pangan Nasional mendorong pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kerja sama antar daerah serta optimalisasi fasilitas tol laut, kargo pesawat dan moda angkutan lainnya guna memobilisasi produk pangan dari daerah yang surplus ke daerah yang defisit. Mobilisasi pangan dengan fasilitasi distribusi pangan hingga tanggal 5 November sudah terealisasi sebanyak 1,73 juta ton. Dalam menjaga stabilitas harga kami juga telah dan sedang terus akan melakukan gerakan pangan murah di manapun kami berupaya menyediakan pangan dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

Kegiatan GPM (Gerakan Pangan Murah) tersebut telah terealisasi di 1.397 titik, 35 provinsi di 317 kabupaten kota. Kami juga telah melakukan *kick off* penyaluran bantuan pangan *intervensi* pengendalian kerawanan pangan 2023 yang dilakukan 1 November di Purworejo Jawa Tengah. Penyaluran ini dilaksanakan di delapan provinsi, Bengkulu, Jambi, Jateng, Kalbar, Kalteng, Bangka Belitung, Papua Barat, dan Papua Barat Daya pada 22 kabupaten/kota di 366 desa dengan jumlah 98.600 keluarga.

Dalam kesempatan yang baik ini kami tidak lupa mengajak kepada segenap Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI dan seluruh masyarakat untuk turut menerapkan konsumsi pangan B2SA (beragam bergizi seimbang dan aman) sejak dini. Melalui gerakan B2SA *goes to school* dengan sasaran 40.000 siswa pada 150 sekolah. Pola makan B2SA berisikan sepertiga makanan mengandung karbohidrat, sepertiga sayuran, seperenam lauk-pauk, seperenam buah-buahan. Selain itu kami menghimbau masyarakat untuk senantiasa menerapkan stop boros pangan dan juga belanja bijak. Hal tersebut dapat mengurangi *food loss and waste*, stabilisasi pangan dan menumbuhkan toleransi kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.

Demikian yang dapat kami sampaikan dan kami sangat terbuka terhadap masukan dan koreksi yang membangun dari Bapak-Ibu Pimpinan dan

Anggota Komisi IV. Apabila ada ingin yang di-*share* kami bisa detailkan bersama Eselon I dan II kami.

Terima kasih.

Billahi taufik walhidayah

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Terima kasih Pak Arief.

Berapa catatan yang sudah di paparannya tentang beberapa program yang sudah dilakukan.

Saya persilakan para anggota yang diwakili oleh Bu Kiki atau Pak Slamet. Pak Slamet silakan.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Katanya saya nanti ditambahi di itu Bu.

KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Oke silakan.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Terima kasih Pimpinan.

Saya juga *enggak* banyak tadi sudah rapat dengan Badan Pangan ini kan sering tapi tidak beranjak begitu.

Saya hanya begini Pak Arief, pertama ini impor kan jalan terus nih sementara tugas Pak Arief ini kan luar biasa sebenarnya jadi jadi kalau dibilang Menko katanya juga Menko juga karena mengorkestra beberapa kementerian. *Nah*, pernah *enggak* dilakukan untuk kemudian atau paling tidak tolong saya minta tolong dikaji subsidi pasca panen deh untuk komoditas-komoditas pangan kita? Karena begitu kita yakinkan bahwa petani ini mendapatkan kesejahteraan atas komoditas yang dia tanam dengan sendirinya produktivitas itu akan akan dipenuhi. Ketika dulu saya pernah ngomong di Kementerian Pertanian sampai hari ini kajiannya belum ada.

Nah, salah satu mungkin kesimpulan Bu Ketua, kita minta *deh* kajian. Jadi kalau kajian saja mungkin belum ada *boro-boro* kemudian-kemudian kita untuk mensejahterakan petani karena memang hari ini petani itu ya diserahkan

kepada pasar ya jadi bagaimana nasib tergantung pada 1.000% Tuhan yang Maha Esa, *weh* begitu jadi keberadaan pemerintah seolah-olah tidak ada perannya.

Nah yang kedua terkait juga tadi disampaikan oleh Pak Kepala Badan tentang gerakan pangan apa Gerakan Pangan Murah. Masalahnya di sini kan kalau menurut saya menyambung ke tadi kenapa kita impor karena memang ya apa produktivitas kita itu kan tidak mencukupi kebutuhan rakyat kita yang banyak. Kenapa produktivitas kita tidak banyak? Ya karena tadi apa tidak ada kepastian sehingga harga hari ini juga mahal tetapi di saat yang lain teriak. *Nah* saya ingin mendapatkan konsep bagaimana kemudian pemerintah nanti apa yang akan dilakukan saat memang panen puncak ya. Mohon kalau salah diluruskan Pak Buwas. Yang saya lihat data serapan panen dari potensi petani kita itu 3%an dari seluruh stok potensi yang ada yang disampaikan oleh apa TP.

Nah 2024 kebijakan apa? Harusnya seluruh potensi nanti petani kita panen disuruh dibeli oleh Bulog apapun alasannya. *Nah* ini kita ingin dapat terobosan ini dari Pak Kepala Badan karena apa begitu pemerintah menguasai stok saya yakin mau isu El-Nino, El-Nina apapun judulnya ketika pemerintah menguasai stok saya yakin swasta tidak akan main-main. *Nah* saya kalau kemudian 3% diserap oleh Bulog artinya 97% itu kan diserap oleh swasta hukum dagang pasti berlaku. Siapa yang pegang barang pasti dia mengendalikan harga. Pemerintah akhirnya tidak ya mohon maaf pemerintah akhirnya hanya tolong *dong* kendalikan inflasi jangan mahal-mahal. Akhirnya pemerintah yang harusnya gagah menjadi seperti mohon maaf pengemis kepada pengusaha. *Nah* ini ini menjadi catatan sehingga kita akan lihat terobosan Pak Arief 2024 Bulog diberikan kewenangan sepenuhnya untuk membeli. Jangan dibatasi dengan harga apapun. Kalau ada regulasi yang memang harus dirubah sampaikan kepada kami secara dukungan politik kita akan berikan dukungan bahwa Pak Arief bisa menyejahterakan petani dengan kebijakannya.

Itu Bu Ketua. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Walaikumsalam

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Ya terima kasih Bu Ketua diizinkan boleh?

KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Boleh.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Ya tadi barusan Pak Endro *ngomong* mau *ngomong* juga sebentar katanya begitu.

KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Baiklah.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Menyampaikan katanya singkat padat juga semua. Prinsipnya begini Pak Arief Pak Buwas dan jajaran antara kami berharap dengan Bapanas ini terlalu besar atau bagaimana *enggak* paham juga ya tapi pasti yang namanya Badan Pangan Nasional sebagai pembuat kebijakan dari hilirisasi produk-produk hulu ini memang kita pasti akan *support* ya tadi Pak Slamet sampaikan. Contoh keputusan impor itu yang sering kali saya bilang tidak selalu berefek kepada stabilitas harga beras itu fakta ya. Kemudian tadi di rapat sebelumnya juga sudah kami sampaikan yang namanya Komisi IV ini bukannya kami juga konsumen tapi untuk hari ini kami tidak bisa juga semua ini tidak bisa berbohong bahwa kami senang sekali dengan senyum para petani hari ini. *Nah* ini butuh sebuah formulasi kebijakan bagaimana harga yang hari ini jangan sampai membuat petani menangis kembali begitu *loh*, karena bagaimanapun petani ini kelasnya harus ditingkatkan kan itu tujuannya mekanisasi dan lain-lain.

Nah kemudian juga ini dari Ibu Endang bagaimana ada katanya distribusi bantuan pangan beras ya kan. Bagaimana sistem pemantauan mutu dan kualitas bantuan pangan? Dampaknya? Kontrolnya, begitu? Itu bagaimana karena kan ini akan berlangsung selama beberapa bulan. Kemudian juga ada pertanyaan mengenai *policies*-nya mau bagaimana yang dibuat sama Bapanas mengenai *food waste*.

Kemudian yang terakhir harus kami sampaikan Badan Pangan Nasional ini sekali lagi saya *underline highlight* bukan badan teknis. *Oke* saya ingatkan teknis itu bukan di bapak-bapak sekalian tapi *policies* ini untuk kesekian kalinya Pak Arief saya sampaikan ya. Saya minta maaf kalau memang mungkin apa yang kami sampaikan... saya tahu sih *everyone is running for something* yang bisa mungkin menjadi sebuah apa ya *achievement* bahwa *legacy* saya waktu saya pegang begini begitu *loh* berarti kasihan banget Pak Buwas ya kalau begitu karena Bulog hari ini ya begini-begini saja kan begitu ya Pak nah tapi kita *support*.

Saya jujur sebagai anak mantan ASN saya kepingin Bulog kembali seperti dulu jujur saja begitu *loh*. Bagaimana sih peran Bulog dulu itu? ya kan tetapi mungkin melalui kajian Badan Pangan Nasional bagaimana untuk kembali lagi supaya semua ini ya tapi memang susah ya Pak bunganya saja masih bunga komersil ya kan, anggaran juga tidak berpihak pada Bapak. Saya mengecek salah satu di *rice milling* yang ada di Sumatera Selatan yang satu-

satunya jalan saya telepon Kepala Bulog wilayah saya *enggak* akan bisa bersaing dengan yang namanya swasta. Yang swasta ini sempat bisa langsung taruh kapal di pinggir angkut dengan harga yang itu ya *of course* lah ya sudahlah itu *wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh* Pak judulnya cuma seperti itu.

Kemudian besar harapan saya tadi saya di ruang transit kita mengobrol-ngobrol bercanda. Betul sih harus ada penyeragaman program yang memang oke saya tahu mungkin Bapanas ini bentuknya kebijakan sosialisasi, sosialisasi kebijakan *oke* tapi jangan pernah lempar sesuatu kalau belum *firm*. Saya sampaikan tadi sama Pak Sarwo bahkan ya Pak Sarwo ya, tadi saya sampaikan sama Pak Arief juga saya sampaikan walaupun ada Pak Maino Pak Yamto saya harap maunya Pak Kepala Badan juga diterjemahkan dengan sebaik-baiknya. Kami DPR ini menjalankan fungsi pengawasan supaya pada saat kami rapat pun kami *enggak* mengarang, kan Bapak juga *enggak* suka pasti kalau kami rapatnya mengarang-ngarang pasti kami kan juga kepenginnya rapat itu *based on fact* dan saya yakin semua Komisi IV ini hanya itulah kemampuannya karena itu kewajiban kami untuk mewakili konstituen di sini duduk di sini Pak.

Sehebat-hebatnya Bapak kerja sendiri Bapak *enggak* punya kaki di tingkat provinsi dan kabupaten/kota Pak pasti bapak butuh saran. Itulah namanya bermitra Pak kita kerja ya saya *case-nya* paham nih sekarang Pak Buwas gudang Bapak di Sumsel mungkin sya karena kondisinya memang begitu *gitu loh* sampai saya bilang berapa kesanggupannya jadi hal-hal teknis seperti ini yang harus kita diskusikan Pak Arief supaya bisa dapat kebijakan yang apa yang bisa memang tidak mungkin menyenangkan hati setiap orang tapi paling tidak bisa mendekati hal yang menjadi *legacy* Pak Arief sebagai pertama kali menjadi kepala Badan Pangan Nasional ya kan.

Nah itu mungkin Ibu Ketua mungkin Pak Endro katanya mau menyambung karena ini kepentingan juga beliau untuk berbicara sebagai wakil rakyat. Terima kasih Ibu Ketua.

KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Pak Endro mau berbicara?

F-P.GERINDRA (Ir. ENDRO HERMONO, M.B.A.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang kami hormati Direktur Badan Pangan Indonesia,
Yang kami hormati Dirut Bulog dan Rajawali eh Rajawali Nasional
Indonesia dan seluruh jajarannya dan
ID Food dan juga**

Teman-teman Komisi IV termasuk yang yang kami hormati Pimpinan Komisi IV,

Tadi Ibu Pimpinan mengatakan bahwa hari ini kita berbicara tentang membahas tentang kebijakan pangan, stabilitas pangan, kecukupan pangan dan sebagainya dan sebagainya dan itu *fluktuasi* sekali bahwa juga diketahui bahwa saat sekarang ini mungkin adalah yang tertinggi untuk gula. Kalau untuk beras ini ada stabil tapi tinggi yang pernah tinggi dan sebagainya dan sebagainya.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Tentunya kita tadi juga mendengarkan bahwa anggaran-anggaran yang ada di Badan Pangan ini kalau *enggak* salah sekitar 400-an sekian miliar. Kemudian mungkin juga nanti dari Bulog itu sekian. Yang ingin kami dapatkan informasi Pak, bahwa di sini kalau kita melihat ini harga *fluktuasi* kali dan ini sepertinya ini adalah sebetulnya adalah kompetisi total dengan swasta dan tadi kita dengar juga dari Pak Slamet juga mengatakan kita berbicara-bicarakan-bicarakan tapi bergerak juga *enggak* bisa karena jumlah penyerapan juga kecil dan kita tahu bahwa di dalam kompetisi ini paling tidak tiga hal yang apa yang menjadi indikator kita bisa menang atau kalah. Yang pertama teknologi yang kedua SDM sumber daya manusia dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah modal.

Ketika kita kompetisi dengan swasta, kalau modal kita kalah ini walaupun kita punya wewenang dan sebagainya ini juga masih mengkhawatirkan bahwa kita itu bisa menang. *Nah* mumpung di sini Pak Arief yang juga sudah malang-melintang di dalam bidang perberasan dan juga bidang temannya untuk swasta saya kira kenalannya banyak sekali. Saya ingin mengetahui sebetulnya kondisi yang kita pegang ini yang kita kerjakan ini yang kita bahas ini dibandingkan swasta itu bagaimana? Karena ada pepatah yang mengatakan kalau kita tidak tahu kekuatan lawan itu kemenangan kita hanya 50% 50% lah tetapi kalau kita tahu kita akan tahu posisi kita kita kalah atau menang ya kemudahan perdagangan. Dalam perdagangan dan kita tahu bahwa dengan anggaran yang dimiliki oleh Pak Buwas di Bulog atau Badan Pangan dibandingkan dengan swasta yang seperti itu posisi kebijakan yang akan kita ambil itu bagaimana Pak Arief supaya kita nanti kita tahu itu yang pertama.

Yang kedua kalau kita kalah di dalam modal, kita kalah dengan SDM strateginya kita itu untuk menang itu bagaimana supaya kita bisa mengendalikan. Jangan sampai nantinya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Slamet tadi kita hanya ngikut suatu perang yang kita ngikut-ngikut-ngikut saja bahkan tadi ada istilah yang kurang enakkan juga ngemis dan sebagainya itu ini. Kita menginginkan kita itu menang di dalam perdagangan ini tetapi kalau modal kalah, SDM kalah, teknologi juga kalah ini nanti bagaimana? Saya kira itu yang ingin kami mendapat gambaran dalam hubungan dengan kita menciptakan stabilitas kebijakan dan kecukupan pangan ini.

Saya kira itu terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Sudah tidak ada lagi Bapak-Ibu. *Kok* banyak sekali ini PDIP ini? Vita *enggak* ada lagi, siapa? Vita mau jadi ngomong-omong *enggak*? Bu Kiki? Sudah, sudah eh *eyang* mau bicara *sampun*. *Oh sampun*. Baik, Pak Rudi Pak Edward, *enggak* ya.

Terima kasih Bapak-Ibu atas masukannya.

Pak Arief, satu hal yang ingin saya tekankan beberapa selain pertanyaan dari beberapa anggota, inisiasi untuk saya mengejar ini Pak mohon maaf kalau saya ingatkan terus rancangan undang-undang untuk *food waste* itu. Jadi itu harus jadi prioritas karena di situlah fungsi dan apa perannya dari Bapanas itu di situ. Kebijakan yang tadi disampaikan oleh Mbak Kiki itu bahwa Bapanas itu lebih kepada kebijakan dan undang-undang itu *food waste* itu menurut saya penting untuk dikaji lebih dalam lagi begitu. Kira-kira misalnya kalau sudah dikaji seperti apa? begitu ya terus kemudian kemungkinan-kemungkinan untuk bisa bisa di *provide* begitu kepada masyarakat tentang undang-undang itu seperti apa?

Saya pikir itu silakan Pak Arief untuk direspons.

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (H. ARIEF PRASETYO ADI, S.T., M.T.):

Terima kasih Bu Pimpinan.

Pak Slamet mumpung ini bisa saya jelaskan. Jadi kami juga tidak dalam posisi *sungkan* untuk melakukan importasi tapi tugas saya sebagai Kepala Badan Pangan Nasional untuk Deputi I itu bicaranya mengenai ketersediaan dan stabilisasi pangan. Kemudian importasi itu mau dilakukan apabila neracanya itu defisit. Khusus untuk beras walaupun tadi disebutkan proyeksi 2023 surplus 280.000 ton tetapi kalau *drafting* memang bisa kita lihat di semester II utamanya di tiga bulan terakhir itu pasti kita defisit sehingga ada rebutan GKP (Gabah Kering Panen) ya itu yang menstimulus kenaikan harga.

Kemudian harga beras ya memang kita harus memilih antara GKP naik otomatis harga beras juga naik begitu. *Enggak* bisa kita GKP-nya bagus kemudian harga berasnya juga turun, kecuali nah kecuali kalau produktivitas yang rata-rata nasional 5,2 ton per hektar bisa ditingkatkan menjadi misalnya 6 atau 7 atau 8 ton per hektar. Itu ada kemungkinan ya. Kemudian mengenai beli dengan harga yang baik bolak-balik memang disampaikan oleh Pak Slamet, kalau kondisinya seperti hari ini kebutuhan 2,55 juta per bulan kemudian produksinya di bawah 1,6 juta ton, Bulog saya kita minta masuk ke dalam maka

penggilingan padi lebih tidak dapat beras lagi, lebih *enggak* dapat bahan baku lagi untuk digiling.

Jadi begini, perusahaan-perusahaan penggilingan padi hari ini tidak bisa okupansinya terpakai 100% karena GKP-nya terbatas di market. *Nah* kalau kita lihat di grafik ini Pak Slamet, jadi kalau tugas Bulog untuk menyerap memang waktunya sangat pendek dan itu akan dilakukan bulan Maret-April-Mei. Jadi begitu kondisi puncak seperti ini Bulog masuk itu untuk menjaga harga di tingkat petani tidak jatuh seperti yang Bu Kiki tadi sampaikan karena harga itu biasanya akan jatuh pada saat panen raya di Bulan Maret-April grafiknya demikian.

Kemudian tentunya kalau ditanya punya rencana apa, Bulog ini memang harusnya serap sebanyak-banyaknya di bulan tadi. Kalau lewat dari itu sekarang *enggak* mungkin karena bahwa sekarang serap, orang penggiling padi swasta saja sekarang kekurangan begitu ya nanti harga lebih tinggi lagi sehingga fungsi di bulan November, Desember atau Januari tugas Bulog adalah menggelontorkan stok.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Interupsi Pak Kepala Badan ya. Boleh Bu Ketua?

Ya teori itu sudah kita bandingkan dengan makanya tadi kita bicara soal 2024. 2023 boleh ditampilkan berapa persen Pak Bulog Pak Buwas menyerap, sangat kecil bahkan nol koma nol koma ya. Ketika presentasi waktu itu RDP saya kaget, saya hitung nol koma nol sekian persen dari puncak panen *nah* sehingga kita akan bicara ke depan 2024 apa yang akan dilakukan? Jangan sampai nanti ada keluhan lagi pembatasan harga sehingga pada akhirnya Bulog *enggak* bisa beli. Kita bicara 2024 sekarang kita juga *enggak* berani komen terkait dengan ketahanan pangan yang ada ya jadi karena tidak mau disalahkan.

Yang kedua tadi untuk kemudian petani mendapatkan apa kesejahteraan, kemudian impor dikurangi, rakyat yang lain mendapatkan haknya untuk mendapatkan pangan yang terjangkau. itu kira-kira produksi minimal oleh kementerian pertanian berapa sih yang harus... walaupun tadi Pak Arief sudah sehingga di situlah kemudian kita duduk bersama di Rakor bersama, Pak Arief untuk kemudian mengurangi impor Pak Mentan butuh sekian *loh kok*, kesanggupan bapak seperti apa? *Nah* ini saya pikir perlu Bu Ketua sehingga kita ingin mendapatkan proyeksi Pak Kepala Badan 2024 supaya ini ditekan itu harus diproduksi di angka berapa petani Kementerian Pertanian? Saya pikir itu penting Bu, sehingga nanti kita tidak bicara lagi stok *enggak* ada ini *enggak* ada begitu ya.

Kenapa hari ini harga terus tinggi ini pikiran jelek saya makanya kemarin ketika di Surabaya saya tanya ke Pak Arief saya minta data tahu *enggak* pemerintah data yang ada di swasta ya karena tadi asumsi kalau diserap 3% 97% akan dikuasai oleh swasta dengan asumsi bahwa ini El-Nino ditiupkan isu stok kurang misalnya harga dimainkan. *Nah* kita senang petani harga tinggi tapi

ada rakyat lain yang kemudian mempunyai hak untuk mendapatkan pangan yang terjangkau. Oleh karena itu, itulah fungsi pemerintah hadir di tengah-tengah untuk menjembatani semuanya. Ya sehingga kita saya lebih bicara tentang 2024 seperti apa *planningnya*, Pak Arief butuh menurunkan impor produksinya harus sekian kita minta kesanggupan dari Kementan. Jangan sampai kemudian Kementan bicaranya *overstock gitu* karena kemampuan produksi ternyata kemudian di lapangan enggak ada. Itu Bu Ketua saya pikir menjadi hal baik kita untuk kemudian sepakati.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya pertanyaannya dijawab *simpel* saja artinya yang ditanya saja itu yang dijawab 2024 itu *planningnya* seperti apa supaya mengurangi impor, harusnya kita produksi berapa? begitu kan Pak ya harusnya kita produksi berapa? Dan Bulog itu nantinya itu bisa menyerap berapa?

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (H. ARIEF PRASETYO ADI, S.T., M.T.):

Mau cerita sedikit waktu saya ditugasin sebagai Plt. Mentan yang saya target adalah 35 juta ton. Jadi di halaman 36 ini perhitungan surplus dan defisit dan potensi produk beras. Jadi total itu yang diperlukan sekitar 35 juta ton untuk Bulog bisa serap sekitar 3 juta ton. Tahun 2023 produksi 30,62, tahun 2022 30,2, tahun 2021 30,04, tahun 2020 29 koma, jadi itu konsumsi. Kalau produksi kita lihat tahun 2018 33,9 tahun 2019 31,3 jadi selama produksinya angkanya di 30 31 31 Bulog ini sulit untuk mendapatkan stok 3 juta ton pasang. *Nah* sehingga nanti tolong bisa kita konversi tadi Pak Mentan sampaikan pemanfaatan rawa, kemudian indeks pertanaman dinaikkan dari 1,4 bisa jadi 2 atau 2,5 kali itu semua yang harus kita kerjakan.

Kemudian faktor-faktor pendukungnya seperti pupuk itu wajib jadi kalau pupuk sudah naik harganya 3 4 5 6 kali kemudian subsidinya masih sekitar 25, 25 triliun begitu ya itu memang pastinya akan berkurang jumlah pupuknya. Kalau pupuknya berkurang otomatis produktivitasnya pasti akan berkurang. Jadi banyak hal yang memang kita harus duduk sama-sama Bu, makanya kami duduk juga kami dengan Komisi IV sehingga produksi di Kementerian Pertanian itu bisa kita dorong, begitu Pak Slamet kurang lebih.

Sehingga Bulog ini kita pakai memang untuk menyerap menjaga harga di tingkat petani. Kalau di luar negeri ada subsidi *out* namanya jadi yang bukan subsidi pupuknya apa segala macam tapi subsidi yang dibeli. Misalnya kalau harga rata-rata 6.000 GKP Pak Buwas belinya tambahkan 2.000 per kilonya itu otomatis akan masuk ke Bulog begitu ya, tapi kalau HPP-nya Bulog Pak Slamet dinaikkan misalnya harga di 5.000 kita naikkan ke 7.000 nanti swasta itu akan naikkan lebih dari situ. Jadi berapapun angka yang dinaikkan Bulog pasti *private* itu akan naik di atasnya sehingga nanti akan sangat pengaruh kepada inflasi.

Nah ini bicara masalah strategi saja Pak, kalau memang nanti mau dibuat regulasi Bulog misalnya harga market plus 2.000 ya sudah kita hitung saja 2.000 kali berapa juta yang mau disiapkan begitu bisa dilakukan seperti itu, kalau memang demikian yang kita mau rencanakan sama-sama kita juga bisa lakukan hal yang sama sehingga Bulog stoknya dari pengadaan dalam negeri. Tetapi, pada saat kebutuhan kita 30 juta ton ini kemudian kita *shortage* kita lakukan hal yang sama seperti ini juga tidak juga tidak akan mengobati apa-apa karena sumber dari segala ini adalah produksi ya. Jadi sumber dari masalah yang ada hari ini adalah produksi sehingga mau Bulog suruh serap berapa banyak uangnya ada berapapun kalau produksinya masih dekat-dekat 30 juta 31 juta akan terjadi seperti ini kurang lebih begitu Pak Slamet.

KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Tapi nyatanya berapanya rendah sekali itu?

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (H. ARIEF PRASETYO ADI, S.T., M.T.):

Iya betul karena jumlah produksinya *enggak* jauh dari 30,5 31 juta ton satu tahun.

KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Memang tidak ada barangnya?

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (H. ARIEF PRASETYO ADI, S.T., M.T.):

Bulog ini menyerap sekitar 800 sampai 900.000 ton tahun ini, hampir mirip sama tahun sebelumnya. 800 sampai 900.000 ton penyerapan.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

800 dari potensi panen yang disodorkan itu kan sekitar 7 juta itu makanya persentasinya itu jangan begini jadi ya iya memang sangat kecil. Pertanyaan saya juga secara regulasi, Bulog ini mungkin *enggak* di luar CBP eh CPP itu ada kewenangan *enggak*? Maksudnya begini...

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (H. ARIEF PRASETYO ADI, S.T., M.T.):

Ada komersil.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Kalau di PP itu kan CPP itu kan hanya 1,5 juta ya atau itu minimal? Artinya kalau memang memungkinkan secara regulasi ya hadir pemerintah.

Pemerintah itu kan punya segalanya Pak ya, APH punya Satgas Pangan punya kalau swasta mau ini ya *ladenin* saja sampai di titik mana karena nanti tadi memang kurang inflasi tapi kita pertama harus neraca-neracanya harus dilakukan. Kenapa? Karena ketika pemerintah sudah pegang stok nanti harga itu akan terkendalikan ya. Ketika pembelian gabah itu harga tinggi yang dapat untung kan memang petani tapi hadir pemerintah dengan subsidi saya pikir bisa mengendalikan harga beras pada akhirnya karena apa stoknya dikuasai pemerintah. Bayangan sederhana saya seperti itu Pak. Kalau kemudian yang 3% dikuasai hanya dipegang oleh Pak Buwas itu ya kayak garemin apa... laut ya enggak akan ada efeknya. Mohon maaf ini.

Begitu Ibu Ketua.

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (H. ARIEF PRASETYO ADI, S.T., M.T.):

Saya tambahkan sedikit. Pak Slamet betul jadi Bulog ini Pak Slamet punya dua skema. Yang skema pertama cadangan beras pemerintah yang harganya 9.950 beras medium tapi pada saat bersamaan Pak Dirut Bulog, Pak Yamto, Bu Febi di Bulog bisa menyerap dengan harga komersial. Jadi tinggal Pak Dirut Bulog saja putuskan *toh* yang kemarin dilakukan adalah serap komersial bisa kita *convert* jadi beras CBP jadi ini bisa dikerjakan Pak Slamet. Jadi tinggal Pak Dirut Bulog kebijakannya bersama Direksi serap beras secara komersial nanti dicadangkan apabila ingin di-*convert* menjadi cadangan beras pemerintah kita *convert*. Jadi beliau tergantung Pak Dirut Bulog. *Nah* ini regulasinya sudah dibuat Pak Slamet jadi ada peraturan badan yang menyebutkan untuk mengkonversi dari beras komersial kepada beras CBP. Jadi nanti silakan Pak Dirut Bulog untuk bisa merencanakan penyerapannya mau berapa banyak. Silakan Pak Dirut Bulog untuk melakukan penyerapan komersial nanti kita *convert* menjadi CBP silakan bisa.

Kemudian berikutnya untuk Bu Kiki, tentunya hari ini dengan NTP yang ada kita harus jaga terus ya. Kalau yang ini kalau yang Ibu sampaikan kita *policies* tapi di peraturan badan pangannya itu di Pasal 3 kita tuh melaksanakan Bu, jadi pelaksana-pelaksana-pelaksana-pelaksana-pelaksana sehingga kami memang melaksanakan *enggak* cuman *policies* begitu. Pelaksanaan pengendalian keamanan dan kerawanan pangan dan gizi, pelaksanaan pengembangan panganekaragaman konsumsi, pelaksanaan bimbingan teknis, ini pelaksanaan semua. Jadi kita kerjakan sesuai dengan tupoksi kita sesuai dengan Perpres yang ada Perpres 66 kecuali kalau yang memang dengan BUMN di bidang pangan ya Bulog ya kemudian dengan ID Food atau RNI memang kita siapkan teman-teman ini untuk menyiapkan cadangan pemerintah.

Nah kemudian untuk bantuan pangan beras mutu dampak ini hari ini stok Bulog itu tidak ada yang lebih dari satu tahun. Kalau dulu namanya *iron stock* hari ini namanya *dynamic stock*, jadi keluar *in out in out in out* begitu ya sehingga Bulog itu

F-PDIP (RIEKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Ibu Ketua sedikit.

Kembali ke *slide* sebelumnya boleh sedikit saja maaf ya, ya sedikit banget ini karena ini tadi itu. Ada 1.300 titik gerakan pangan murah itu masuk di poin yang mana ya? Kemudian saya juga agak kaget itu di poin f itu ada pelaksanaan poin bimbingan teknis Ibu Ketua.

Terima kasih.

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (H. ARIEF PRASETYO ADI, S.T., M.T.):

Kalau Gerakan Pangan Murah itu bersama pemerintah daerah, bersama teman-teman itu ada di poin b. Ini kolaborasi jadi koordinasi pelaksanaan ketersediaan pangan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Jadi ini dikombinasikan dengan kalau kemarin kan ada di satu kabupaten/kota begitu ya bersama kita semua setiap hari Senin dengan menteri dalam negeri kita lakukan konsolidasi. Jadi di mana kita melakukan pasar murah-pasar murah gerakan pasar murah begitu Bu dan ini juga bisa *request* ya dari beberapa pihak ya. Kita lakukan secara bersama-sama jadi bukan apa namanya, *teng gladrah* begitu ya bahasa Jermannya tapi kita kerjakan sesuai dengan peraturan presidennya.

Kemudian berikutnya lagi mengenai *food waste...*, bimbingan teknis juga kita lakukan jadi masing-masing deputi para direktur juga ada di sana untuk sesuai dengan huruf f ya pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pangan. Tentunya ini semua bersama dinas-dinas urusan pangan walaupun kita tidak punya kaki di apa namanya..., Badan Pangan Daerah tetapi bersama dengan dinas urusan pangan di kabupaten kota kita punya dekonsentrasi, Bu Kiki, begitu mungkin sekitar 30 sampai 35% anggaran badan pangan itu kita pakai dekonsentrasi untuk program-program kita yang ada di daerah.

Untuk *food waste*, Bu Anggi ini RUU-nya kita sudah mulai dengan *hearing* bersama Kumham. Kemudian sarannya adalah kita akan bersama kementerian lembaga kita akan undang nanti di minggu kedua November nanti Pak Sestama juga akan undang sebagai *follow up* setelah kemarin sudah *hearing* dengan Kumham. Jadi ini akan kita dorong terus kalau nanti bentuknya undang-undang kami akan laporkan ke Komisi IV tentunya.

Kemudian untuk Pak Endro, kalau ini mungkin jawabannya bukan jawaban dari Kepala Badan Pangan Nasional tapi mantan Dirut begitu ya. Yang pertama kalau kita mau berkompetisi mengenai teknologi. Teknologi yang dimiliki BUMN utamanya di bidang pangan ini harus di *upgrade* segera dan itu perlu PMN. Contoh kalau kita mau punya cadangan pangan pemerintah dalam bentuk *frozen chicken* ya tolong *cold room*-nya dibangun yang besar, disiapkan. Pada saat panen kita banyak sekali harga *live bird* di bawah 17.000 tugas BUMN di bidang pangan adalah menyerap. Berarti dua, yang satu adalah

infrastruktur yang kedua adalah *working capital*. Kalau yang namanya RNI tidak punya *cash* untuk meng-*off take* apalagi pembiayaannya semua dari hutang ya seperti hari ini. Jadi sudah dihitung sama Pak Erick juga itu total sekitar 41 triliun. 41 triliun ini bukan untuk uang tetapi meng-*convert* 41 triliun ini dalam bentuk Cadangan Pangan Pemerintah. Jadi berapa *Frozen chicken* yang mau kita kuasai? berapa *frozen meat* yang mau kita kuasai? berapa itu sudah dihitung sebenarnya.

Kemudian nanti kita bagi antar *term over*-nya 3 bulan 3 bulan 3 bulan begitu ya tidak tidak terus-menerus. Jadi pada saat kemarin perang Ukraina-Rusia ada pertanyaan kepada saya dari salah satu Menko berapa ketahanan berapa lama ketahanan pangan kita kalau terjadi perang nuklir. Saya bilang kita *enggak* punya cadangan pangan yang kuat ya. Kalau kita mau punya cadangan pangan yang kuat ya salah satunya kalau di luar negeri ada bunker ya sedemikian besar ya. Berapa persen yang harus kita stok? Kalau kita mau punya sampai dengan satu tahun ke depan ya berarti sudah ada hitungannya semua Pak tinggal kita punya uang *enggak* yang dialokasikan ke sana kemudian ada biaya simpan misalnya kalau refrigerator 350 sampai 500 per kilo ya per bulan ya kalau setahun tinggal dikalikan saja 12 ya. Kemudian berapa kapasitas *storage-storage* kita yang ada di Indonesia.

Kemudian mengenai SDM. Ya SDM harus kita harus *mix* ya profesional-profesional harus kita *hire* dari *private sector* untuk nge-*blend* dengan teman-teman di BUMN di bidang pangan. Kemudian kalau bicara modal tadi sudah saya sampaikan modal itu ada yang satu infrastruktur yang satu lagi modalnya adalah untuk *working capital* kurang lebih begitu Pak dan yang harus kita siapkan adalah *custom base*. *Custom base* itu artinya begini Kementerian Pertanian beserta jajaran menanam, menanam sesuatu yang diperlukan market. Jangan menanam yang tidak diperlukan market.

Misalnya contoh *sugar cane* kemarin diskusi dengan Pak Presiden diperintahkan untuk Merauke 4,2 juta hektar dipakai untuk kawasan ekonomi khusus untuk pangan dan energi eks zamannya Pak almarhum Arifin Panigoro sebelah sana ya itu disiapkan. Itu misalnya disiapkan untuk 1,5 juta hektar nanti untuk *sugar cane* ya. *Sugar Cane* ini nanti dipakai buat dua yang satu untuk *food* atau gula yang satu lagi untuk *etanol* untuk *biofuel*. Nah yang kayak begini-begini Pak, kalau kita mau maju ke depan harusnya kita sudah memikirkan itu *enggak* mikirin lagi kita kurang kita lebih kita kurang *enggak*. Jadi satu kawasan yang besar modalnya itu sekitar 3 sampai 5 triliun nah itu disiapkan.

Mohon maaf kira-kira demikian Pak Endro.

F-P. GERINDRA (Ir. ENDRO HERMONO, M.B.A.):

Sebentar saja Bu tambahan.

Jadi saya rangkum intinya jawaban ini mohon maaf kalau saya salah dengan anggaran seperti itu berarti program-program kita itu hanya mimpi karena untuk apa tadi untuk teknologi *up grade* perlu uang kemudian ini juga

perlu *hire* perlu uang, apalagi untuk beli juga perlu uang tapi dengan anggaran yang ada sekarang ini berarti hanya mimpi.

Saya kira itu terima kasih.

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (H. ARIEF PRASETYO ADI, S.T., M.T.):

Kami memulai dari 1,5 triliun yang kami minta spesial kepada Menteri Keuangan. 1,5 triliun itu nanti akan ada diskon bunga ya sekitar 4,75 waktu itu *diskon* apa *rate*-nya BI *rate*-nya itu sekitar 475 belum seperti sekarang di atas 5 misalnya. *Nah* itu adalah pemotongan bunga subsidi bunga. ID Food ya tentunya sekarang sama teman-teman di Himbara BUMN itu melakukan koordinasi sedemikian, di Bulog sudah mulai 1 triliun ya. Kalau ini nanti ke depan bukan *commercial base* ya tetapi subsidi bunga ini akan sangat membantu BUMN di bidang pangan dalam melakukan penyerapan Pak Endro. Tapi kalau yang disampaikan tadi kita mau seperti pabrik-pabrik di Brazil kemudian di beberapa negara maju yang memang perlu modal tapi ini *engak* sulit sebenarnya Pak begitu berdasarkan *market base* sehingga *revenue* dari perusahaan ini bisa dipertanggungjawabkan. Kurang lebih demikian Pak Endro.

KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Baik, terima kasih. Sudah kalau Kakak Ansi bilang sudah cukup Bu, cukup kalau begitu. Terima kasih Bapak-Ibu. Pak Arief terima kasih untuk apa... jawabannya dari masukan dari pertanyaan dari Bapak-Ibu Anggota. Pak Buwas ada yang mau disampaikan? Cukup? Baik. Kalau begitu saya langsung izin langsung saya ke kesimpulan ya Bapak Ibu, setuju? Baik, tolong disampaikan.

Saya akan bacakan kesimpulan rapat kita kali ini.

Poin pertama,

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kepala Badan Pangan Nasional mengenai realisasi pelaksanaan anggaran Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 6 November 2023 sebesar Rp303.912.355.426,00 atau 65%, 65,39% dari total pagu anggaran sebesar Rp464.776.703.000,00. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Badan Pangan Nasional untuk melakukan percepatan pelaksanaan program kerja dan anggaran serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi serapan anggaran dekonsentrasi.

Para Anggota?
Pak Arief?

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (H. ARIEF PRASETYO ADI, S.T., M.T.):

Setuju.

(RAPAT: SETUJU)

KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Poin dua,

2. Komisi IV DPR RI meminta Badan Pangan Nasional untuk melakukan kajian mengenai subsidi di pasca panen yang hasilnya disampaikan kepada Komisi IV DPR RI paling lama tujuh hari sejak rapat dengar pendapat hari ini.

Para Anggota?

Subsidi pasca panen itu termasuk termasuk serapan Bulog tadi yang kita bicarakan. Kajiannya tujuh hari ya Pak.

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (H. ARIEF PRASETYO ADI, S.T., MT):

Boleh ditambah *enggak* Bu? Kalau boleh satu bulan kan produknya kan banyak *enggak* cuman beras kan.

KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Yang termasuk di dalamnya paska panen kan.

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (H. ARIEF PRASETYO ADI, S.T., MT):

Minta waktu sebulan ya bu.

KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Sebulan Bapak Ibu?

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Izin Ibu Ketua.

Pokoknya begini saja pak, masa sidang depan ya izin Bu Ketua ya pada saat buka ya sudah....

KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Langsung ada.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Langsung ada saja kan enak tuh sudah liburan ya kan.

KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya masa sidang depan itu Januari loh masih lama Pak. Oke satu bulan setuju?

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (H. ARIEF PRASETYO ADI, S.T., MT):

Setuju.

(RAPAT:SETUJU)

KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Dua saja, ada masukan? Saya pikir cukup.

Terima kasih Bapak-Ibu, Pak Arief, Pak Buwas dan semua jajarannya, terima kasih atas perhatian dan diskusi kita kali ini. Pak Direktur RNI Rajawali dan semuanya ID Food semuanya terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, Aamiin. Mudah-mudahan Komisi IV semuanya 54, 2024 dilantik kembali.

Terima kasih saya tutup rapat kita kali ini.

*Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Tharieq
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.27 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

ULFA NURFAJAR
NIP. 197401251993022001